

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA UD TOHU SRIJAYA KOTA BATU**

SKRIPSI



Oleh

NEIL AMSTRONG MARIAR

NIM: 2015110070

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2021

ABSTRAK

PPN atau sering dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai dapat dikatakan sebagai salah satu alat pengganti dari perpajakan atas penjualan, adapun alasan diadakan pergantian pada PPN perlu dirasakan sudah tidak lagi untuk menampung berbagai macam aktivitas yang ada pada kalangan masyarakat serta belum juga mencapai pada sebuah sasaran berdasarkan pada kebutuhan atas pembangunan, serta tingkat pemerataan pembebanan atas pajak. Bagaimana perlakuan akuntansi PPN pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. yaitu pengetahuan akuntansi pajak, PPN, pelaporan dan keuangan pada UD tohu srijaya malang. Kegiatan riset ini dapat dikatakan sebagai salah satu syarat dalam tuntutan akademisi. Untuk mampu melaksanakan pajak atas perkembangan sebuah nilai dalam sebuah industri yang secara tepat sehingga secara langsung dapat menghindari dari hal-hal yang menyimpang berdasarkan pada pajak penghasilan yang tanpa disengaja.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai PPN,Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PPN atau sering dikenal dengan nama pajak pertambahan nilai dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang mana akan digantikan dari pajak atas penjualan pada dasarnya sebuah alasan untuk diadakan pergantian atas PPN tersebut sudah lagi tidak secara efektif sebagaimana dapat dilaksanakan untuk menampung berbagai macam aktivitas yang ada di kalangan masyarakat serta secara langsung juga belum mampu untuk mencapai sebuah sasaran yang berkaitan dengan tingkat kebutuhan atas pembangunan, misalnya dalam memaksimalkan sistem penerimaan pada sebuah negara juga untuk memotivasi atau mendorong atas pembangunan terhadap pajak. Sebuah cara yang digunakan sekaligus dapat dikatakan sebuah hal yang sangat penting terhadap massa terhadap anggaran yang dimiliki oleh sebab itu tingkat perolehan anggaran dari pajak dapat dikatakan juga sebagai salah satu hal yang sangat dominan terhadap sumber penerimaan pada negara. Oleh sebab itu seluruh warga negara sebagaimana dapat memenuhi berbagai macam mekanisme sebagai WP berdasarkan dengan tingkat ketentuan atas wajib pajak untuk memiliki sebuah kewajiban dalam membayar pajak. PPN dapat juga dikatakan sebagai salah satu pacar yang akan dikenakan terhadap penyerahan barang atau jasa yang mana kena pajak yang seharusnya akan dilaksanakan oleh pihak industri (Mardiasmo, 2016 : 331)

Menurut Mardiasmo (2016:345) Menyatakan bahwa PPN dapat dikatakan sebagai salah satu pajak yang mana akan dikenakan pajak pada ada waktu pihak

industri yang melaksanakan pembelian barang jasa. Disetiap proses pembelian sebuah barang sebagaimana secara langsung juga dapat mengkorelasikan barang yang akan dihasilkan serta dapat dijual, oleh sebab itu pajak juga dikenakan pada barang terhadap pengusaha atau sering dikenal dengan nama PKP juga dapat dikatakan sebagai salah satu pajak yang memberikan kontribusi sebesar 10% berdasarkan harga dan pembelian apabila barang tersebut akan meningkat mencapai 10% dari harga jual yang sebelumnya pajak sebagai keberhasilan dapat juga dikatakan sebagai tingkat menyeluruh yang paling terutama atas pajak yang bersangkutan

(Suhendri, et.al,2021) menyatakan bahwa dapat dikatakan sebagai salah satu modal dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas serta sarana dan prasarana sebagaimana dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan yang secara global atau umum. Dalam melaksanakan pembukuan atas pencalonan terhadap akuntansi dan jauh lebih benar dan baik wajib pajak akan dapat menetapkan serta mampu mengalokasikan tingginya sebuah pajak yang jauh lebih cepat. Akan tetapi pihak aparat atas perpajakan yang seharusnya tidak berprasangka efektif serta mampu untuk menanggalkan sebuah kebenaran sebagaimana dilaksanakan dalam orang oleh pihak wajib pajak Disamping itu dapat memberikan sebuah tingkat pelayanan yang baik.

Dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas bisnis ditemukan pula pajak penghasilan terhadap nilai yang mana secara langsung dikenakan terhadap pengusaha hal tersebut disebabkan karena sistem pembelian barang maupun jasa yang akan dikatakan sebagai dengan pajak penghasilan terhadap nilai serta PPN

mengeluarkan yang akan digunakan oleh pihak pengusaha disebabkan juga karena pengusaha yang melaksanakan penjualan produk atau barang akan disebut sebagai pengeluaran atas perpajakan. Dengan adanya sebuah pajak penghasilan keluaran atau masukan Hal ini disebabkan karena terjadinya interaksi antara penjual serta pembeli barang yang mana kena pajak terjadi juga perbedaan diantaranya, Adapun selisih nilai yang kemudian akan dibayar oleh pihak pengusaha Yang kurang membayar serta dapat diberikan juga kok bisa sih terhadap minat.

Ditemukan gula adanya pengusaha-pengusaha Iya sama sekali belum mengerti terhadap pajak pertambahan nilai atau sering dikenal sebagai nama PPN, bagaimana sepertinya dapat memberikan sebuah tindakan mengabaikan terhadap sebuah transaksi atas pembeli yang dilaksanakan, sebuah tindakan dalam memahami pajak pertambahan nilai yang sama sekali tidak dinyatakan sebagai salah satu tindakan yang terakreditasi serta bagaimana cara untuk dapat memperlakukan pajak pertambahan nilai masukkan yang sama sekali tidak dilaporkan atas sebuah laporan keuangan.

Dalam sebuah industri dapat digolongkan menjadi berapa bagian industri jasa dapat dikatakan sebagai salah satu industri yang mampu melakukan berbagai macam aktivitas penjualan jasa terhadap pihak konsumen, sedangkan pada industri dagang merupakan salah satu industri yang melaksanakan aktivitas pembelian barang dagang, disamping itu akan dilaksanakan judul proses penjualan balik terhadap pihak konsumen, industri merupakan salah satu industri yang melaksanakan proses produksi dari bahan mentah menjadi barang yang siap digunakan. Oleh sebab itu industri yang berada di negara Republik Indonesia

Apabila seseorang akan membuka sebuah lahan pekerjaan terhadap Masyarakat khususnya pada aspek akuntan dikarenakan seseorang perlu dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti industri yang mana mampu untuk mengurus berbagai macam aspek finansial ada.

Sebuah laporan finansial disusun oleh pihak manajemen yang ada pada industri dengan tujuan untuk dapat memahami serta dimengerti berdasarkan dengan tingkat kebutuhan yang secara bersama-sama terhadap pengguna, oleh sebab itu sebuah laporan finansial sama sekali tidak dilaksanakan penyusunan secara khusus oleh pihak industri untuk satu atau lebih dari pengguna itu sendiri. Laporan finansial dapat dikatakan juga sebagai salah satu alat dalam pengambilan sebuah keputusan pada ruang lingkup industri perusahaan, apabila pihak perusahaan yang bersangkutan dapat dinyatakan tidaknya liquid atau makna sebuah laporan finansial merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan sebuah laporan dapat juga dibutuhkan oleh pihak lain misalnya editor, karyawan serta investor.

Akuntansi dapat digolongkan menjadi beberapa bagian akuntansi serta pajak, akuntansi dapat dikatakan sebagai salah satu proses pencatatan bahkan sampai dengan sebuah transaksi atas keuangan dan pada akhirnya dengan sebuah pembuatan laporan atas keuangan, sedangkan pajak merupakan sebuah iuran yang secara langsung dipungut oleh pihak pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan negara dengan pengeluaran negara proses pembangunan Disamping itu juga tanpa memberikan balasan sebagai telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.

WP sebagaimana dapat melaksanakan sebuah usaha yang seharusnya dapat membayar pajak terhadap kas negara, spesifik ialah pada perusahaan dagang yang mana memberi kemudian akan melaksanakan proses penjualan kembali terhadap konsumen, selain dikenakan pajak penghasilan dikenakan juga pada pajak pertambahan nilai atau sering dikenal dengan nama PPN yang mana merupakan sebuah pajak secara langsung akan dipotong atau dipungut oleh pihak pemesan, hal tersebut dikarenakan di dalam sebuah beban yang dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Suprianto, 2011:16).

Sebagaimana telah dibahas pada pekerjaan tersebut di atas. Sehingga dalam riset ini Peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan riset yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada UD Tohu Srijaya Kota Batu

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang akuntansi pajak, (PPN), laporan keuangan, dalam membuat laporan keuangan.?
2. Apakah faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku UD Tohu Srijaya dalam membuat laporan keuangan.?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Menganalisis latar belakang akuntansi pajak, PPN, laporan keuangan atas pembuatan laporan keuangan
2. Mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaku UD Tohu Srijaya dalam membuat laporan keuangan.?

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
 - a. Dalam riset ini sebagai salah satu syarat yang paling terutama dalam menyelesaikan studi di bangku kuliah Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
 - b. Untuk dapat memiliki sebuah kontribusi yang jauh dan besar yang berkaitan dengan ilmu akuntansi serta mampu untuk menginterpretasikan pada dunia kerja
 - c. Secara langsung mampu untuk memahami serta dapat juga melatih berdasarkan pada tingkat pemahaman dan kemampuan untuk mengkaji sebuah teori kenyataan
 - d. Berdasarkan dengan kajian teori tersebut maka secara langsung juga dapat mengembangkan pola pemikiran serta pemahaman yang dimiliki
2. Bagi UMKM
 - a. Akan selalu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar serta dapat bermanfaat terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam

menetapkan sebuah pajak atas pertambahan nilai serta dampaknya terhadap penyajian sebuah laporan keuangan

3. Bagi Universitas
 - a. Secara langsung dapat mempererat kembali antara pihak perusahaan dalam hal ini UD Tohu Srijaya dengan lembaga pendidikan
 - b. Dapat memaksimalkan tingkat kualitas SDM yang jauh lebih tinggi di dunia pendidikan khususnya pada Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
- Sanusi Anwar. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Gunadi. 2002. Pajak Penghasilan. Jakarta : salemba empat.
- Hani, Syafrida. 2015. Teknik Analisa Laporan Keuangan. Medan: UMSU PRESS.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrihastuti, Poppy, Malimatul Amaniyah (2020), Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, Optima. p-ISSN : 2549-239X e-ISSN : 2549-2705.
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro, 2009, Perpajakan, Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta.
- Najiyullah, Ahmad. 2010. Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68

Sukardi, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.